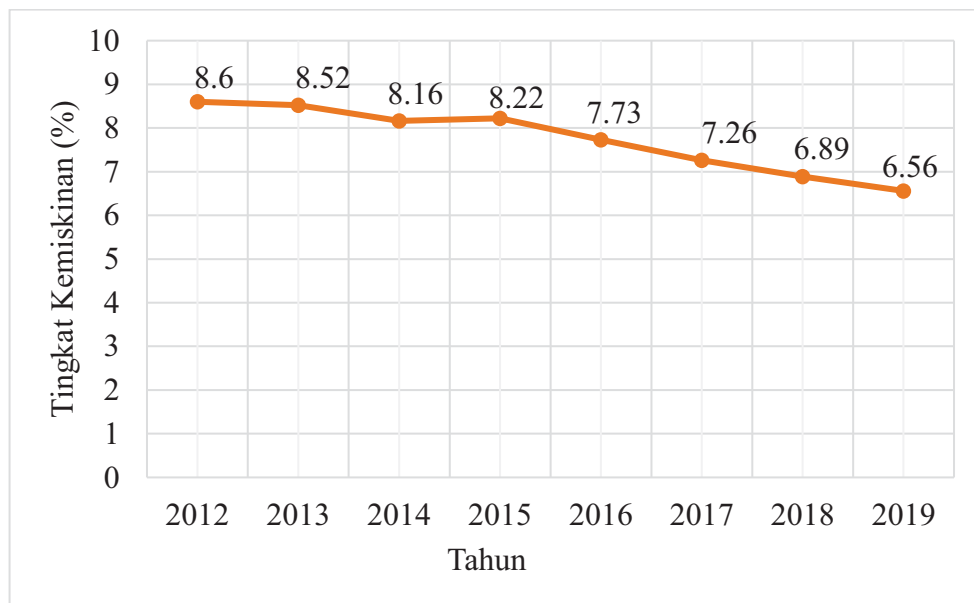


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengukur proporsi penduduk miskin (BPS, 2019). Tingkat kemiskinan wilayah perkotaan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 6,56 persen atau menurun sekitar 2.04 persen dari tahun 2012 seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2012-2019
Sumber: BPS, 2019

Penurunan kemiskinan dapat terjadi karena adanya interaksi dari beberapa faktor yaitu: kebijakan/program pengentasan kemiskinan, perubahan karakteristik rumah tangga miskin, kondisi ekonomi, sosial dan demografi. Program pemerintah

yang ditujukan kepada keluarga, individu serta kelompok yang tidak mampu seperti program keluarga harapan (PKH), program kelompok usaha bersama (KUBE), program subsidi listrik, program subsidi elpiji 3 kg, program beras sejahtera (Rastra), program bantuan pangan *non* tunai, subsidi pupuk, program Indonesia pintar, program jaminan kesehatan nasional dan program lainnya berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan (TNP2K, 2018).

Karakteristik rumah tangga seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, status pekerjaan, jumlah anggota rumah tangga, lokasi tempat tinggal, keterbatasan dalam mengakses program-program pemerintah, bantuan dan kredit dalam banyak studi sebelumnya dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan kemiskinan pada level rumah tangga. Perubahan karakteristik rumah tangga miskin terutama pada aspek pendidikan, akses terhadap program dan kredit, serta status pekerjaan juga berperan dalam menurunkan kemiskinan.

Selanjutnya, perubahan dalam variabel-variabel makroekonomi seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, suku bunga dan tingkat kesehatan penduduk menentukan tingkat kemiskinan pada level makro. Analisis tingkat kemiskinan level makro menggunakan data agregat. Ciri data agregat menggunakan data tingkat kemiskinan dari kabupaten/kota bukan data level individu atau rumah tangga.

Analisis kemiskinan bukan hal baru, tetapi masih sangat relevan untuk dilakukan terkait isu ketimpangan yang masih cukup besar dalam akses penduduk terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik dan sanitasi. Merujuk pada

Sukartini dan Saleh (2016), rata-rata jumlah penduduk di kabupaten/ kota yang telah mengakses ketiga-tiga infrastruktur dasar tersebut berturut-turut adalah air bersih (49 persen), listrik (83,75 persen), sanitasi (59 persen) dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Merujuk BPS (2019), persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (40 persen bawah) menurut provinsi mencapai 84,91 persen pada tahun 2019 dalam rentang nilai antara 44,99 persen hingga 99,80 persen. Rumah tangga yang telah menggunakan penerangan dengan sumber listrik (40 persen bawah) telah mencapai 99,01 persen pada tahun 2019 dalam rentang nilai antara 56,87 persen hingga 100,00 persen. Selanjutnya, rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (40 persen bawah) pada tahun 2019 mencapai 66,57 persen dalam rentang nilai antara 21,04 persen hingga 91,19 persen. Peningkatan akses air minum layak, penggunaan listrik dan sanitasi layak diyakini banyak pihak dapat menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup penduduk dan produktivitasnya.

Ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota juga cukup tinggi. Berdasarkan BPS (2021), rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota selama 2016-2019 adalah sekitar 5,3 persen dalam rentang nilai terendah -0,2 terjadi di provinsi NTB hingga tertinggi 11,5 persen terjadi di provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, 11 provinsi tercatat dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kurang dari rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota selama 2016-2019.

Ketimpangan dalam pendidikan menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi di beberapa wilayah menjadi masalah cukup serius (Rahayu, 2005; Wardhana, *et.al.*, 2019; Randa dan Sentosa, 2020; Yuniar *et.al.*, 2022). Hasil studi Riyadi dan Ghuzini (2021) menunjukkan sebanyak 41 kabupaten/kota memiliki ketimpangan pendidikan sedang hingga sangat tinggi. Pendidikan kota lebih baik dibandingkan pendidikan yang jauh dari kota.

Ketimpangan pendidikan berhubungan erat dengan ketimpangan pendapatan. Randa dan Sentosa (2020) menemukan hubungan searah antara ketimpangan pendidikan dan ketimpangan pendapatan. Wardhana, *et.al.*, (2019) menemukan ketimpangan pendidikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil serupa juga ditemukan Mayer (2010), Coady dan Dizioli (2017), Jong-Wha lee dan Hanol Lee (2018), Maliti (2019), Munir dan Kanwal (2020). Ketimpangan pendapatan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan (Ncube *et al.*, 2014; Wan *et al.*, 2020). Kemiskinan berhubungan positif dengan ketimpangan pendidikan (Senadza, 2012). Mengurangi ketimpangan dalam pendidikan berpeluang meningkatkan kesempatan kerja produktif baik di sektor formal maupun informal dan mengurangi kemiskinan (Rahman *et al.*, 2020).

Analisis kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai ketimpangan antar wilayah menjadi sebuah urgensi yang membutuhkan solusi. Penelitian ini menganalisis tingkat kemiskinan yang menggunakan data agregat. Review literatur menunjukkan bahwa faktor penentu tingkat kemiskinan sangat beragam. Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi selanjutnya, akan diakomodasi dalam penelitian

ini. Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh ketersediaan akses air minum layak, akses sanitasi, akses listrik, produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk dan belanja modal.

Air minum layak adalah komponen mendasar untuk mengentaskan kemiskinan karena kekurangan air minum layak dan kemiskinan saling terkait erat (Ahmad, 2003). Kekurangan air minum layak dan sanitasi yang tidak memadai mempengaruhi kesehatan masyarakat miskin, ketahanan pangan mereka, dan prospek mereka untuk mencari nafkah. Air minum layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menurunkan biaya hidup dan meningkatkan kesejahteraan (Budiono dan Purba, 2020). Ketersediaan akses air minum layak mampu mengurangi tingkat kemiskinan di India (Chotia dan Rao, 2014).

Infrastruktur berupa akses air minum layak, akses listrik, akses sanitasi, jaringan telekomunikasi dan transportasi merupakan variabel konstituen dalam pembangunan infrastruktur dari sebuah negara maju (Chotia dan Rao, 2017; Marinho *et al.*, 2017; Jerome, 2011). Peningkatan akses terhadap sanitasi layak berdampak pada pengetesan tingkat kemiskinan (Saleh, 2002; Jerome, 2011; Nguyen *et al.*, 2013). Sanitasi layak yang memadai menghindarkan penduduk dari penyakit dan meningkatkan produktivitas (Brenneman, 2002).

Keterbatasan akses listrik mengurangi produktivitas dan kreativitas penduduk. Dampak dari kurangnya akses listrik pada negara berkembang dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan penundaan peningkatan pembangunan (Banerjee *et al.*, 2021). Chotia dan Rao (2017) menemukan hubungan kausalitas positif satu arah akses listrik kepada tingkat kemiskinan penduduk di India.

Bagaimanapun, pengaruh akses listrik terhadap kemiskinan adalah tidak langsung (Nugroho, 2015). Akses listrik berperan penting untuk meningkatkan aktivitas produksi dari penduduk dimana waktu produksi dapat berlangsung dari pagi hingga malam hari (Christiani dan Nainupu, 2021). Ria (2021) menemukan bahwa peningkatan elektrifikasi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui saluran pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian kemiskinan di luar negeri menemukan PDRB berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dalam jangka panjang namun, dalam jangka pendek PDRB tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Malaysia (Roshaniza *et al.*, 2015). Produk domestik regional bruto Nigeria berhasil menurunkan tingkat kemiskinan (Hassan, 2015). Penelitian tingkat kemiskinan di Indonesia menemukan PDRB kabupaten/kota berpengaruh terhadap kemiskinan beberapa wilayah Indonesia (Bintang dan Woyanti, 2018; Ariwuni dan Kartika, 2019; Budhi, 2013; Susanti, 2013; Putra *et al.*, 2020; Ridzky Giovanni, 2018). Hasil penelitian lainnya menemukan PDRB Provinsi Aceh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan artinya peningkatan PDRB belum mampu mempengaruhi penurunan kemiskinan (Nufus dan Ratna, 2021).

Pertumbuhan penduduk yang cepat cenderung mengurangi pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan per kapita, yang cenderung meningkatkan kemiskinan. Efek buruk dari pertumbuhan penduduk yang cepat pada kesehatan anak, dan mungkin pada pendidikan, kemungkinan besar akan meningkatkan kemiskinan pada generasi berikutnya (Birdsall, 1980; Hause dan Zimalirana, 1996; Ahlburg, 1996; Klasen, 2007). Studi yang dilakukan oleh Hakim dan Sutrisni

(2020) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Borneo. Studi oleh Nufus dan Ratna (2020), Agustina *et al.*, (2019) menemukan hasil yang sama.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur dasar bagi upaya mengurangi kemiskinan telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan alokasi belanja modal. Beberapa studi menemukan bahwa peningkatan belanja berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, seperti (Agustien *et al.*, 2017; Lantu *et al.*, 2019; Agustien *et al.*, 2017). Hasil serupa ditemukan dalam Fan *et al.* (2004), Anderson *et al.* (2006), Thorat dan Fan (2007), Murty dan Soumya (2007). Sementara, studi-studi lainnya seperti Nurmainah (2013), Budiono dan Purba (2020), Demak *et al.* (2020) menemukan bahwa belanja modal pemerintah tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa dua tahapan analisis tingkat kemiskinan. Pertama analisis tingkat kemiskinan nasional menggunakan data keseluruhan (518) kabupaten/kota di Indonesia. Kedua analisis tingkat kemiskinan berdasarkan disagregasi wilayah berdasarkan lokasi lima pulau terbesar di Indonesia dan pulau kecil disekitarnya. Disagregasi wilayah terdiri dari: Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali-NTB, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku-NTT–Pulau Papua. Urgensi penelitian menghasilkan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan berupa program pengurangan tingkat kemiskinan nasional dan program kemiskinan spesifik sesuai dengan karakteristik dari masing-masing disagregasi wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akses listrik, akses sanitasi, akses air minum layak, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal, berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota dan disagregasi wilayah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh akses listrik, akses sanitasi, akses air minum layak, PDRB, jumlah penduduk dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota dan disagregasi wilayah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengembangkan literatur studi yang memiliki hubungan dengan kemiskinan dengan data agregat.
2. Penelitian ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pemahaman terkait tingkat kemiskinan secara nasional pada 518 kabupaten/kota. Hasil analisis spesifik berdasarkan disagregasi wilayah yaitu: Pulau Sumatera, Jawa-Bali-NTB, Kalimantan, Sulawesi dan NTT-Maluku-Papua.
3. Penelitian ini memberikan masukan untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah pada masing-masing kabupaten/kota.